

# ANALISIS FRAMING BERITA KPK VERSUS POLRI DI SURAT KABAR MEDIA INDONESIA DAN JAWA POS

Oleh: Khoirun Nasifah  
Pembimbing: Dr. Belli Nasution, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Komunikasi – Jurnalistik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru  
28293 Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*The newspaper of Media Indonesia and Jawa Pos are national media that each has a different point of view in the way of preaching the chaotic The Corruption Eradication Commission KPK and The Police Of Republic Of Indonesia (POLRI). This news was a result of the construction of the two media are framed differently according the editorial policy and viewpoints of both media. To that end, the matter was examined how the news framing of Media Indonesia and Jawa Pos newspaper on KPK versus POLRI during the period from 23 January to 27 January 2015. This research aims to find out how the framing the proclamation of Media Indonesia Jawa Pos newspaper on the KPK versus POLRI case. As well as to know the ideological representation of the Annunciation KPK versus POLRI in both newspapers.*

*The methods used in this study is a qualitative method of framing analysis approach. In data collection, researchers using the technique of documentation and interviews. After the data was collected, then the researchers analyzed by using four basic elements framing expressed by Zhongdang Pan and Gerald M Kosicki. The subject of the research is composed of journalists and Media Indonesia and Jawa Post redactional devices. The objects in this research is the news of KPK versus POLRI in the Media Indonesia and Jawa Post newspaper January 23, 2015 until January 27, 2015 edition.*

*The results showed that; First, the Jawa Pos framing the KPK leader reporting as swept up as the establishment candidate's Assistant Budi Gunawan as a suspect by the KPK, so reporting the leadership of KPK was a form of criminalization. While the Media Indonesia framing reporting leader KPK as a regular legal process, public speculation that the reporting done because the 'revenge' Police to the KPK was incorrect. Second, the Jawa Pos in the proclamation of the chaotic KPK-POLRI do alignments against the KPK. Alignments being performed related ideology of Jawa Pos that looks at the institutions of the KPK as most institutions 'clean'. While the ideology of the Media Indonesia in framing news KPK versus POLRI was represented with emphasis on aspects of the law being used in news coverage.*

*Keywords: Framing analysis, news, newspaper*

## PENDAHULUAN

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Polisi Republik Indonesia), merupakan dua lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya kerap bersinggungan, jejak-jejak benturan itu telah dimulai pada tahun 2009. Pimpinan KPK Antasari Azhar ditahan Polri dengan tuduhan sebagai otak pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen (Sumber: *kompas.com*, diakses pada 29 Januari 2015).

Polri juga melakukan penahanan pimpinan KPK lainnya, Bibid Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Penangkapan Bibid dan Chandra tersebut disinyalir dampak dari KPK yang mempidanakan mantan Dubes (Duta besar) RI untuk Malaysia yang juga mantan Kapolri Jendral (Purn) Rusdihardjo, atas pungutan liar kepada para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang dilakukan di Kedubes RI di Malaysia (Sumber: *kompas.com*, diakses pada 29 Januari 2015).

Pada tahun 2012 lalu, KPK dan Polri kembali berseteru. Kali ini korupsi proyek simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) di Korlantas (Korps lalu lintas) Polri yang menyeret perwira tinggi, Irjen (Inspektur jendral) Polisi Djoko Susilo menjadi penyebabnya. Polri bersikukuh penyidikan kasus tersebut adalah wewenang lembaganya, Polri pun berupaya mengambil alih penyidikan dari KPK (Sumber: *kompas.com*, diakses pada 30 Maret 2015).

Setelah KPK menetapkan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka, lembaga KPK menghadapi gugatan dari Korlantas Polri, Polri mengajukan gugatan dengan nilai

mencapai 425 miliar rupiah. Gugatan perdata tersebut diajukan dengan alasan Korlantas Polri mengalami kerugian dengan penyitaan 349 item barang dan dokumen yang dilakukan KPK (Sumber: *kompas.com*, diakses pada 30 Maret 2015).

Penetapan tersangka oleh KPK terhadap calon Kapolri tunggal, Budi Gunawan yang ditunjuk Presiden Jokowi pada Januari 2015 menjadi babak baru benturan KPK vs Polri. Polri tidak tinggal diam, Polri pun lantas menjerat ketua KPK, Abraham Samad dengan dugaan melakukan manuver politik. Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto pun tak luput dari jeratan Polri, dugaan rekayasa kesaksian palsu di sidang MK (Mahkamah Konstitusional) dialamatkan kepada Bambang.

Kasus ini menjadi isu nasional, media massa cetak maupun elektronik banyak mengulas tentang kasus tersebut. Media massa mempunyai potensi untuk mempengaruhi opini atau agenda publik melalui framing yang dilakukan. Begitu juga kasus KPK vs Polri, bisa saja dibingkai dan dimaknai berbeda oleh media.

Menurut Eriyanto (2005:139) perbedaan pembingkai (framing) dan pemaknaan tersebut dikarenakan realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) bukan ditangkap dan ditulis, melainkan dikonstruksi. Dalam proses konstruksi tersebut terdapat banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda dalam memahami suatu realitas.

Framing berita KPK vs Polri tampak pada surat kabar Media Indonesia dan Jawa Pos. Penulis memilih periode 23 Januari hingga 27 Januari 2015. Jum'at, 23 Januari merupakan hari pertama berita

mengenai pimpinan KPK Abraham Samad yang diduga melakukan lobi politik guna memperoleh jabatan sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi pada Pilpres 2014 lalu terkuak di media.

Sehari pasca kejadian tersebut, Jawa Pos menurunkan beritanya dengan judul 'Ada Bukti, KPK Usut Abraham', disertai gambar Abraham Samad tengah menggunakan jaket berwarna hitam bertuliskan KPK di dadanya. Sementara Hastu menggunakan topi dan masker sambil menunjukkan alat pendeteksi penyadapan telepon seluler.

Sedangkan Media Indonesia menggunakan judul 'Bentuk Komite Etik Usut Abraham' dalam beritanya. Tampak dalam gambar, Hastu Kristiyanto menggunakan topi dan masker sambil menunjukkan alat bukti. Menurutnya, begitulah tampilan ketua KPK Abraham Samad setiap kali melakukan pertemuan dengan elite partai guna melakukan lobi politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai bagaimana surat kabar Media Indonesia dan Jawa Pos mengkonstruksi berita KPK vs Polri dengan menggunakan analisis framing.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana surat kabar Media Indonesia dan Jawa Pos membingkai pemberitaan KPK vs Polri.
2. Untuk mengetahui representasi ideologi surat kabar Media Indonesia dan Jawa Pos dalam pemberitaan KPK vs Polri.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Framing**

Ada beberapa definisi mengenai framing yang disampaikan para ahli, meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian, ada titik persamaan mengenai definisi framing. Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak (Eriyanto,2005:66).

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak (Eriyanto,2005:66).

Ada dua aspek dalam framing, pertama memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta didasarkan pada asumsi bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang

(*excluded*). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas, bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan. Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lain. Intinya peristiwa dilihat dari sisi tertentu (Eriyanto,2005:69).

Kedua menuliskan fakta, proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan diungkapkan dengan fakta, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih itu ditekankan dengan menggunakan perangkat tertentu, seperti penempatan yang mencolok (*headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto,2005:70).

### **Komunikasi Massa**

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Media massa terdiri dari media cetak seperti surat kabar, majalah, buletin serta media elektronik seperti televisi, film dan radio. Komunikasi massa merupakan suatu proses komunikasi dimana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan

secara luas, terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak-khalayak yang besar dan berbeda-beda melalui berbagai cara (McQuail,1985 dalam Riswandi,2009:103).

Yasir (2009:131) menyatakan bahwa komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Defenisi ini memberikan batasan pada komponen-komponen dari komunikasi massa yakni pesan-pesan, media massa (koran, majalah, radio, televisi dan film) dan khalayak.

### **Media Massa**

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Jika khalayak tersebar tanpa diketahui dimana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara,2007:122).

Burhan Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi mendefinisikan media massa sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula (2011:72).

### **Jurnalistik**

Jurnalistik atau *jurnalism* secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris *journal* atau dalam Bahasa

Francis *du jour* yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar harian. Jurnalistik merupakan seluk-beluk mengenai kegiatan penyampaian pesan atau gagasan kepada khalayak melalui media komunikasi yang terorganisasi seperti surat kabar, majalah (media cetak), radio, televisi, internet (media elektronik), dan film (*news-reel*) (Barus,2010:2).

Menurut sejarahnya, produk jurnalistik yang pertama berupa surat edaran bernama *Acta Diurna Populi Romawi* yang disingkat dengan *Acta Diurna* yang terbit di Roma Kuno pada tahun 59 SM. *Acta Diurna* terbit setiap hari memuat pengumuman dari Kaisar Roma dan berita-berita kegiatan kekaisaran lainnya (Barus,2010:4).

Istilah jurnalistik erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan istilah pers. Sering sekali orang mengartikan jurnalistik dengan pers. Pers dan jurnalistik dapat diibaratkan sebagai raga dan jiwa. Pers adalah organ yang terdiri dari bagian-bagian secara fisik yang berfungsi karena kegiatan atau hasil kerja dari jurnalistik (Romli,2005:69).

### **Surat Kabar**

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Barus (2010,5) menjelaskan bahwa surat kabar tertulis pertama terbit di Venesia dan Roma sekitar abad pertengahan yang disebut dengan *Gazetta*. *Gazetta* berisi seputar pengumuman pemerintah kota Venesia disamping berita-berita lainnya. Kemudian berlanjut dengan penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450 di Jerman. Dari mesin cetak itu

kemudian muncul istilah *press* (pers).

Di Indonesia sendiri surat kabar pertama kali *Javasche Courant* diterbitkan tahun 1828 di Jakarta. Kemudian surat kabar berbahasa Melayu terbit pada tahun 1885, seperti surat kabar Bintang Barat, Hindia Nederland, Dinihari, Bintang Djohar, Selompret Melayu, Thahaja Moelia dan Pemberitaan Bahroe (Wahyuni,2014:47).

Surat kabar merupakan media massa tertua sebelum ditemukannya film, radio dan televisi. Salah satu kelebihan surat kabar adalah mampu memberi informasi yang lebih lengkap, bisa dibawa kemana-mana dan terdokumentasi sehingga mudah diperoleh bila diperlukan. Surat kabar dapat dibedakan atas periode terbit, ukuran serta sifat penerbitannya.

### **Berita**

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebutnya *Vritta*, yaitu kejadian atau yang telah terjadi. *Vritta* dalam bahasa Indonesia menjadi Berita atau Warta (Djuroto,2002:46).

Hampir seluruh isi surat kabar adalah berita, bahkan ada yang menganggap iklan itu juga berita tentang produk dan jasa. Walaupun iklan menduduki posisi teratas berdasarkan analisis sumber profit, namun sesungguhnya nasib sebuah usaha (terutama persuratkabaran) sangat bergantung pada beritanya. Tidak ada biro yang mau memasang iklan di surat kabar yang isi atau beritanya tidak memiliki nilai jual (Barus,2010:21).

Dja'far H. Assegaff (dalam Barus,2010:26) menjelaskan, berita

merupakan laporan tentang fakta atau ide terkini yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan yang dapat menarik perhatian pembaca. Entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau akibat yang ditimbulkannya, atau entah karena mencakup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi dan ketegangan.

### **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini didasarkan pada tesis tentang realitas sosial yang dianut oleh paradigma konstruksionis dari Peter L. Berger dan Thomas Lucman. Pendekatan ini menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan (Eriyanto,2005:40).

Realitas sosial tergantung pada bagaimana seseorang memahami dunia, bagaimana seseorang menafsirkannya. Oleh karena itu, peristiwa dan realitas yang sama bisa jadi menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda-beda. Penelitian konstruksionis tidak melihat apa yang terlihat dalam teks, tapi apa yang tak terlihat (implisit) dalam teks berita, bagaimana media membingkai peristiwa dan kesan apa yang dikembangkan suatu berita, tetapi tidak diperoleh secara eksplisit apa yang tercetak dalam surat kabar. Ia hanya bisa diperoleh dengan penafsiran, melalui penafsiran realitas yang kompleks dan tindakan individu yang beragam serta tidak beraturan dapat dijelaskan, dipadu dan dirunut benang merahnya (Eriyanto,2005:58).

Pendekatan konstruksionis mengungkapkan bahwa pesan adalah konstruksi, melalui interaksi dengan

penerima (*receiver*). Pesan di sini bukan apa yang dikirimkan, tetapi apa yang dikonstruksi dan apa yang dibaca. Makna bukan sesuatu yang fisik atau statis, tetapi justru produk konstruksi dan interaksi antara pengirim dan penerima.

Dalam pandangan konstruksionis, tidak ada realitas dalam arti *riil* yang seolah-olah ada dan *ajeg*. Realitas sosial tergantung pada bagaimana seseorang memahami dunia, bagaimana seseorang menafsirkannya. Karena itu, peristiwa dan realitas yang sama bisa jadi menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda-beda (Eriyanto,2005:58).

### **Teori Agenda Setting**

Penelitian ini menggunakan teori agenda setting. Teori agenda setting ditemukan oleh McCom dan Donal L Shaw sekitar 1968. Teori ini beramsumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu tersebut juga penting (Griffin, 2012:490).

Teori agenda setting menganggap bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mengubah opini yang ada di tengah masyarakat. Dasar dari pemikiran teori agenda setting adalah diantara berbagai topik yang dimuat media massa, topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi khalayaknya dan akan dianggap penting dalam suatu periode tertentu. Disini media membentuk mengkonstruksi sebuah realitas baru yang sedemikian rupa hingga sangat sulit untuk menghindari terpaan pengaruhnya.

Khalayak bukan saja belajar isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling*, bahkan populasi atau *samplingnya* sangat terbatas (Kriyantono,2010:56). Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bersinggungan langsung terhadap penulisan berita KPK vs Polri, yakni wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, asisten kepala divisi pemberitaan Media Indonesia dan wakil pimpinan redaksi Jawa Pos. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi dan wawancara.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki membagi struktur analisis framing menjadi empat bagian. Pertama struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retorik.

Model Pan dan Kosicki dapat digambarkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Model Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki**

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamati
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun berita	Skema berita	<i>Headline, lead</i> , latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	Kelengkapan berita	5 W + 1 H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	Detail Koherensi Bentuk kalimat Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon Grafis Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Struktur sintaksis, sintaksis adalah cara wartawan menyusun berita. Struktur sintaksis terdiri dari *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan dan penutup. *Headline* merupakan berita yang dijadikan topik utama oleh media, *headline* mempunyai fungsi framing yang sangat kuat. *Headline* digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengkonstruksi suatu isu (Eriyanto,2005:258).

*Lead* (teras berita) ialah paragraf pembuka dari sebuah berita yang biasanya mengandung sudut pandang dari sebuah berita. Sedangkan latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Latar yang dipilih

menentukan ke arah mana pandangan khalayak akan dibawa.

Bagian lain yang tidak kalah penting adalah pengutipan sumber berita. Pengutipan sumber berita dimaksudkan untuk membangun objektivitas berita, sehingga menekankan apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu (Eriyanto,2005:259).

Struktur skrip, skrip ialah cara wartawan mengisahkan fakta, biasanya berupa berita yang disusun sebagai suatu cerita. Skrip digunakan sebagai salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita, bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang disembunyikan dengan cara menempatkannya dibagian akhir berita agar terlihat kurang menonjol (Eriyanto,2005:261).

Bentuk umum dari struktur skrip adalah 5 W + 1 H, *Who* (siapa), *What* (apa), *When* (kapan), *Where* (dimana), *Why* (kapan) dan *How* (bagaimana). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, unsur kelengkapan ini dapat menjadi penanda framing yang diinginkan.

Struktur tematik atau cara wartawan menulis fakta. Bagi Pan dan Kosicki berita mirip dengan pengujian hipotesis. Peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip dan pernyataan yang diungkapkan digunakan untuk membuat dukungan yang logis atas hipotesis yang dibuat. Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Tematik

berhubungan dengan bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan (Eriyanto,2005:262).

Elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini diantaranya adalah koherensi, yaitu pertalian atau jalinan antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta berbeda dapat dihubungkan dengan menggunakan koherensi, sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan.

Ada beberapa macam koherensi, pertama koherensi sebab-akibat, yakni kalimat satu dianggap sebab atau akibat dari kalimat lain. Kedua koherensi penjelas, ialah kalimat satu dilihat sebagai penjelas kalimat yang lain. Ketiga koherensi pembeda, merupakan kalimat satu dipandang sebagai kebalikan atau lawan dari kalimat lain.

Struktur retorik, retorik menggambarkan pemilihan gaya atau kata yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan, dengan kata lain struktur retorik merupakan cara wartawan menekankan fakta. Wartawan menggunakan struktur retorik untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur retorik berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran (Eriyanto,2005:264).

Perangkat retorik terdiri dari leksikon atau pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Dengan demikian, pilihan

kata yang dipakai tidak semata-mata karena kebetulan, tetapi secara ideologis menunjukkan bagaimana pemakaian seseorang terhadap fakta.

Selain kata, penekanan pesan dalam berita juga dapat dilakukan dengan menggunakan unsur grafis. Grafis biasanya muncul melalui bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lainnya. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah atau huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Bagian-bagian yang ditonjolkan menekankan kepada khalayak pentingnya berita tersebut. Elemen grafis juga muncul dalam bentuk foto, gambar dan tabel untuk mendukung gagasan atau bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan (Eriyanto,2005:266).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan berita kisruh KPK-Polri ini Jawa Pos lebih menunjukkan keberpihakan kepada lembaga KPK. Jawa Pos lebih menyoroti bagaimana proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Jawa Pos juga menggunakan judul yang mengindikasikan adanya kesengajaan pihak tertentu untuk melemahkan KPK. Judul lain menekankan adanya bukti yang harus ditunjukkan pihak pelapor, tanpa bukti itu pelapor hanya terlihat mengada-ada. Jawa Pos memandang pelaporan-pelaporan itu imbas ditetapkannya calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

Cara wartawan menyusun berita menempatkan pihak KPK di awal pemberitaan. Bantahan dan sanggahan pihak KPK serta kronologi terkait penangkapan

pimpinan KPK yang dirasa menyalahi aturan diletakkan di awal berita.

Pengutipan narasumber berita semakin memperlihatkan keberpihakan Jawa Pos. Jika dugaan manuver politik Abraham Samad didasarkan pertemuan Abraham dengan partai politik, maka Jawa Pos menggunakan pernyataan Deputy Pencegahan KPK Johan Budi sebagai klarifikasi. Johan Budi menyatakan dalam kode etik, pimpinan KPK dibenarkan melakukan pertemuan dengan partai politik bila menyangkut urusan kedinasan.

Jawa Pos juga menggunakan narasumber seorang sosiolog Imam Prasodjo. Imam mengatakan penahanan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri sangat tidak masuk akal, bahkan ia mengatakan masyarakat Indonesia bisa menilai sendiri ketidakwajaran ini.

Pengutipan pernyataan dari Ketua KPK Abraham Samad kian menguatkan keberpihakan Jawa Pos.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggalang kekuatan, melawan ketidakbenaran ini. Kita semua harus yakin kebenaran dapat mengalahkan kezaliman”. (Jawa Pos, 24 Januari 2015)

Kisruh KPK-Polri memang dijadikan *headline* Jawa Pos, namun *angle* yang digunakan lebih kepada adanya kriminalisasi yang dialamatkan kepada KPK. Melalui pemberitaannya Jawa Pos selalu mengajak pembaca untuk jeli melihat kasus ini, bahwa pelaporan yang dialamatkan kepada pimpinan KPK

mengandung unsur lain yang tidak berkaitan dengan perkara.

Sementara struktur skrip lebih menonjolkan upaya kriminalisasi yang tengah ditujukan kepada lembaga KPK. Fakta dikisahkan wartawan dengan mengambil sisi KPK sebagai 'korban', sedangkan Polri sebagai 'tersangka'. Wartawan juga mengisahkan KPK sebagai simbol 'kebenaran' yang tengah dizalimi. Presiden Joko Widodo yang diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat, dibingkai Jawa Pos sebagai pihak yang tidak tegas. Pembungkaihan ini terkait posisi Jokowi dalam konflik KPK dan Polri sarat akan benturan kepentingan.

Sedangkan dalam tiap beritanya hampir selalu ditemukan kalimat yang menegaskan bahwa pelaporan pimpinan KPK adalah bentuk kriminalisasi, hal itu merupakan rangkaian dari penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK. Bahkan pengunduran Bambang Widjojanto dimaknai sebagai salah satu bukti nyata adanya kriminalisasi.

“Tanda-tanda ke arah penonaktifan seluruh pimpinan KPK sudah terjadi pada Bambang Widjojanto. Wakil ketua KPK itu telah mengajukan penonaktifan pasca penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Bambang menyatakan, meskipun dirinya dan banyak pihak meyakini penetapannya sebagai tersangka penuh rekayasa, dirinya tetap berpatuh kepada

undang-undang.” (Jawa Pos, 27 Januari 2015)

Isi berita kebanyakan menggambarkan kriminalisasi yang tengah dialami KPK, serta dukungan yang diberikan masyarakat kepada lembaga antirakyat tersebut. Berikut teks berita yang menggambarkan dukungan masyarakat terhadap KPK.

“Mendengar kabar bahwa Bambang Widjojanto sudah dibebaskan oleh Bareskrim Polri, suasana meriah langsung mewarnai gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Seluruh massa yang sedang melakukan aksi langsung bersorak dan berteriak gembira. Massa yang sudah mulai beristirahat di dalam gedung KPK juga kembali keluar untuk ikut merayakan. Beberapa ada yang langsung melakukan sujud syukur sebagai ekspresi gembira. Euforia langsung terhenti sejenak saat informasi pembebasan Bambang disiarkan di televisi. (Jawa Pos, 24 Januari 2015)

Melalui penggambaran tersebut, Jawa Pos memosisikan KPK sebagai lembaga yang dihormati dan dicintai masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk ketika pimpinan KPK terlilit masalah hukum. Sekaligus menegaskan jika mengkriminalisasi KPK maka bukan

hanya KPK yang dihadapi, tetapi akan berhadapan juga dengan rakyat.

Pemilihan kata ‘serangan’ dan ‘tudingan’ kerap digunakan untuk menggambarkan kondisi KPK, perangkat leksikon tersebut menguatkan posisi KPK sebagai ‘korban’.

Sebelum serangan kepada BW, sejumlah pihak berupaya menyeret Abraham Samad pada tindakan-tindakan pelanggaran kode etik. Mulai beredarnya foto tidak senonoh hingga tuduhan adanya pertemuan Samad dan elite Parpol berkaitan dengan pemilihan cawapres untuk Jokowi. Informasi yang berkembang di KPK juga menyebutkan, ada pihak-pihak yang sedang mencari kasus kriminal yang bisa dikaitkan dengan Samad. (Jawa Pos, 25 Januari 2015)

Dari segi grafis, gambar yang dimuat menegaskan pembingkai Jawa Pos. Seperti pada tanggal 23 Januari, gambar Hasto Kristiyanto yang merupakan pelapor ketua KPK tampak menggunakan topi dan masker. *Caption* foto berbunyi Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menggunakan masker dan topi menunjukkan alat antisadap telepon genggam saat menggelar konferensi pers.

Masker dan topi yang digunakan Hasto Kristiyanto adalah upayanya menunjukkan alat bukti pertemuan dengan Abraham Samad,

karena menurutnya begitulah penampilan Abraham Samad setiap kali melakukan pertemuan guna melakukan lobi politik. Namun Jawa Pos hanya menyebutkan Hasto Kristiyanto tengah menunjukkan alat antisadap telepon genggam, sehingga megaburkan makna dari pemakaian masker dan topi yang dilakukan Hasto Kristiyanto.

Sementara hal berbeda tampak pada pemberitaan Media Indonesia, pada berita kisruh KPK-Polri, Media Indonesia mendefinisikan berita dengan mengedepankan aspek hukum. Seperti terlihat pada berita dengan judul “Bentuk Komite Etik Usut Abraham”. Wartawan memberikan ide terkait pembentukan komite etik. Komite etik nantinya akan menyelidiki, mengusut dan menuntaskan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan pimpinan KPK tersebut.

Cara wartawan menyusun berita menempatkan pihak pelapor di awal pemberitaan. Didasari bukti-bukti yang ada, wartawan membingkai pelaporan pimpinan KPK sebagai proses hukum biasa. Pelapor merupakan pihak yang harus mendapatkan dukungan agar kebenaran terungkap dan demi mengembalikan wibawa lembaga KPK sendiri.

“Hasto menegaskan, langkahnya ini bukan untuk mendiskreditkan KPK, bukan pula sebagai serangan setelah KPK menetapkan Kapolri terpilih, Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. “Kami tidak berhadapan dengan institusi, kami justru

ingin menyelamatkan roh semangat KPK yang disalahgunakan. Saya merekomendasikan KPK membentuk komite etik untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Abraham. Saya, Hendropriyono dan beberapa menteri kabinet kerja pun siap menjadi saksi, jelas Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.” (Media Indonesia, 23 Januari 2015)

Melalui kutipan tersebut, Media Indonesia menampilkan spekulasi publik mengenai pelaporan yang diarahkan kepada pimpinan KPK sebagai upaya ‘balas dendam’, pelaporan murni proses hukum biasa. Jika pun ada kriminalisasi maka bukan hanya KPK yang mengalaminya, Polri juga demikian. Karena itu penting untuk menyelamatkan Polri juga, selain KPK.

Presiden Joko Widodo dikisahkan Media Indonesia sebagai pihak yang netral dalam konflik KPK-Polri. Hanya saja pembingkaiannya itu dilakukan dengan ‘halus’, masih terlihat upaya Media Indonesia menjaga objektivitas pemberitaan. Seperti kalimat yang menyebutkan Presiden Jokowi kembali menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum wakil ketua KPK Bambang Widjojanto di Polri, dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan di KPK.

Berbeda dengan Jawa Pos yang dalam beritanya menyebutkan banyaknya dukungan publik

terhadap KPK, Media Indonesia memberikan pandangan lain. Publik dibingkai Media Indonesia tengah kehilangan kepercayaan terhadap KPK, publik sedang gundah.

Fakta yang dikisahkan mengambil sisi pelaporan pimpinan KPK dari segi hukum. Polri bukanlah ‘tersangka’ dibalik pelaporan pimpinan KPK tersebut, pelaporan itu karena pimpinan KPK memang melakukan pelanggaran hukum dan oleh karenanya harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pengunduran diri Bambang Widjojanto juga dikonstruksi sebagai proses hukum yang memang seharusnya dijalani oleh orang yang berstatus tersangka.

“Bambang Widjojanto telah mempertimbangkan mundur dari jabatan yang ia emban setelah Polri menetapkannya sebagai tersangka. Saya harus tunduk kepada konstitusi, moral hukum dan etika hukum. UU menyatakan jika ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan melalui Keppres. Nanti pimpinan KPK mengajukan pengunduran diri saya kepada Presiden, ungkap Bambang di kediamannya di Kampung Bojong Lio, Depok”. (Media Indonesia, 25 Januari 2015)

Kalimat yang dipakai lebih sering mengambil aspek hukum

sebagai dasar, seperti kalimat yang menyebutkan Ketua KPK Abraham Samad bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Atau kalimat yang menyatakan bahwa pihak pelapor telah mendapat aduan dari empat saksi yang membuatnya mengambil langkah melaporkan pimpinan KPK.

Retoris memperlihatkan gambar Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meniru penampilan Abraham samad ketika melakukan pertemuan dengan partai politik. *Caption* gambar menyebutkan “Peragakan penampilan Abraham: Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan dengan mengenakan topi dan masker sambil menunjukkan alat pendeteksi penyadapan telepon seluler. Hasto memperagakan penampilan Abraham Samad yang selalu menggunakan topi dan masker dalam setiap pertemuan dengan elite partai pendukung Jokowi”. *Caption* ditulis sangat lengkap dan menguatkan pembingkai Media Indonesia terkait pelaporan pimpinan KPK tidak mengada-ada.

Selain itu, tampak grafis yang menjelaskan kronologi kekisruhan KPK vs Polri. Disebutkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengajukan pengunduran diri setelah Polri menetapkan sebagai tersangka. Hal itu sesuai dengan Undang-undang KPK, apabila pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka dia akan diberhentikan sementara. Grafis kian menguatkan pembingkai Media Indonesia terkait pelaporan pimpinan KPK merupakan proses hukum biasa, pengunduran diri Bambang Widjojanto adalah proses hukum yang memang telah tertulis jelas dalam Undang-undang KPK.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian analisis framing berita KPK versus Polri di surat kabar Media Indonesia dan Jawa Pos dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan konstruksi berita KPK versus Polri di Jawa Pos dan Media Indonesia. Jawa Pos membingkai pelaporan pimpinan KPK sebagai imbas ditetapkannya calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga pelaporan pimpinan KPK merupakan bentuk kriminalisasi. Jawa Pos membingkai KPK sebagai ‘korban’. Sementara Media Indonesia membingkai pelaporan pimpinan KPK sebagai proses hukum biasa, spekulasi publik bahwa pelaporan dilakukan karena ‘balas dendam’ Polri kepada KPK tidaklah benar. Dalam kisruh KPK-Polri, jika terjadi pelemahan maka bukan hanya menimpa KPK tetapi Polri juga.
2. Jawa Pos dalam pemberitaan kisruh KPK-Polri melakukan keberpihakan terhadap KPK. Keberpihakan yang dilakukan terkait ideologi Jawa Pos yang memandang lembaga KPK sebagai lembaga yang paling ‘bersih’, KPK selalu tegas dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Sedangkan ideologi Media Indonesia dalam pembingkai berita KPK versus Polri direpresentasikan dengan mengedepankan aspek hukum yang digunakan dalam pemberitaan. Walaupun dalam analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki masih terlihat pembingkai, namun Media Indonesia berupaya

menjaga objektivitas dan netralitas dalam pemberitaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Devereux, Eoin. 2008. *Understanding The Media, Second Edition*. Singapore: Sage Publications.
- Djurot, Totok. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Griffin, Emory A. 2012. *A First Look at Communication Theory*. USA: The McGraw-Hill Companies.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli M, Asep Syamsul. 2002. *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*. Bandung: BaticPress.
- Sobur, Alex. 2010. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyuni, Siti Nursih. 2014. *Komunikasi Massa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yasir. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.

#### Sumber Lain:

- KOMPAS.com. 2009. *Antasari Azhar Resmi Tersangka*. www.kompas.com. Diakses pada 29 Januari 2015.
- \_\_\_\_\_. 2009. *KPK Gelar Rapat Bahas Penetapan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto Sebagai Tersangka*. www.kompas.com. Diakses pada 29 Januari 2015.
- Media Indonesia, Edisi Jum'at, 23 Januari 2015. Bentuk Komite Etik Usut Abraham.
- \_\_\_\_\_, Edisi Sabtu 24 Januari 2015. Sugianto Dua Kali Laporkan Bambang.
- \_\_\_\_\_, Edisi Minggu 25 Januari 2015. Presiden Pastikan KPK Tidak Lumpuh.
- \_\_\_\_\_, Edisi Senin 26 Januari 2015. Pelibatan TNI Berpotensi Perluas Konflik KPK-Polri.
- \_\_\_\_\_, Edisi Selasa 27 Januari 2015. Jangan Pengaruhi Proses Hukum.
- Jawa Pos, Edisi Jum'at 23 Januari 2015. Ada Bukti, KPK Usut Samad.
- \_\_\_\_\_, Edisi Sabtu 24 Januari 2015. BW Dipulangkan Dini Hari.
- \_\_\_\_\_, Edisi Minggu 25 Januari 2015. Setelah Samad dan BW, Giliran Pandu Dijerat.

\_\_\_\_\_, Edisi Senin 26 Januari  
2015. Pimpinan KPK  
Terancam Habis.

\_\_\_\_\_, Edisi Selasa 27 Januari  
2015. Satu Per Satu Pimpinan KPK  
Dipolisikan.